



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Maret 2014

Halaman: 2

SOSIAL

Jaga 953 TPS, Linmas akan Dilibatkan

JOGJA - Sebanyak 2.890 personil perlindungan masyarakat atau Linmas akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Legislatif 2014 pada 9 April mendatang. Hal itu dilakukan guna mendukung pengamanan selama pesta demokrasi berlangsung. Nantinya Linmas akan mengamankan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Ketertiban Kota Jogja Sukanto mengatakan Linmas nantinya akan membantu untuk pengamanan di lapangan saat digelarnya pemilu. Berada dibawah koordinasi Dintib, Linmas terus diberikan pelatihan kesamaptaan untuk anggota perlindungan masyarakat. Pelatihan ini sendiri dilakukan di setiap kelurahan di Kota Jogja.

"Kami harapkan Linmas dapat mendukung upaya pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat untuk menjaga 953 TPS yang ada," kata Sukanto di Balai Kota kemarin (12/3).

Nantinya dua personil Linmas akan berjaga di TPS yang menjadi bagian dari anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau (KPPS). Sehingga syarat keanggotaannya mengikuti persyaratan yang ditetapkan KPU. Meski sebelumnya aturan persyaratan menyatakan pendidikan yang dimiliki Linmas adalah SMA atau sederajat. Namun syarat tersebut sudah dihapuskan dikarenakan banyak anggota Linmas tidak memiliki pendidikan tingkat SMA atau sederajat.

"Nantinya sepuluh Linmas akan mengamankan masing-masing kelurahan di tiap kecamatan. Terdapat 31 personil yang bersiaga selain itu 100 personil berjaga di Kota Jogja yang akan disiagakan mulai H-2," katanya.

Terpisah, Komisioner KPU Kota Jogja Divisi Penyelenggaraan Aris Munandar mengatakan untuk KPPS sejauh ini sudah tersusun. Hanya saja terkendala pembentukannya, dikarenakan KPU belum bisa memberikan bimbingan teknis (Bimtek) lantaran pedoman dari KPU RI belum turun.

Melihat pemilu sebelumnya, petunjuk teknis untuk KPPS paling tidak diterbitkan 30 hari sebelum pemungutan suara. Namun, waktu yang tersisa tiga minggu menjadi persoalan dimana TPS sangat bergantung dari KPPS.

"Diakuiinya berlarutnya petunjuk teknis dari KPU RI karena persoalan syarat KPPS minimal harus SMS atau SMK. Tetapi KPU RI mengeluarkan edaran baru terkait rekrutmen KPPS syaratnya bisa baca tulis dan pernah menjadi KPPS," ungkapnya. (hrp/ila/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005